

Implementation of the Values of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" in the Management of Tourist Attractions by the Tourism Office in Bukittinggi City

Penerapan Nilai-Nilai "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" dalam Pengelolaan Objek Wisataoleh Dinas Pariwisata di Kota Bukittinggi

Wulan Puspita Sari¹, Ratna Dewi^{*2}

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: ratna.dewi@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the values of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in the management of tourist attractions by the Tourism Office of Bukittinggi City and to identify the factors influencing its implementation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The informants consist of officials from the Tourism Office, tourism managers, traditional leaders, and local communities. The results show that the implementation of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah values in tourism management in Bukittinggi City has not been fully optimized. This is reflected in the presence of tourist behaviors that do not align with local norms and religious values, lack of socialization of these values to visitors, and the limited role of managers and the government in integrating these values into policies and field practices. Furthermore, the factors influencing this implementation include limited human resources, weak policies and supervision, low community participation, and inadequate coordination among related institutions. Therefore, more integrated and serious efforts are needed from the government, community, and traditional institutions to strengthen the application of these values so that tourism management not only generates economic benefits but also preserves cultural identity and religious values.

Keywords: Adat Basandi Syarak, Tourism Management, Local Values, Bukittinggi, Cultural Tourism.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam pengelolaan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Pariwisata, pengelola objek wisata, tokoh adat, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam pengelolaan objek wisata di Kota Bukittinggi belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku wisatawan yang tidak sesuai dengan norma adat dan agama, kurangnya sosialisasi nilai kepada pengunjung, serta belum optimalnya peran pengelola dan pemerintah dalam mengintegrasikan nilai tersebut ke dalam kebijakan dan praktik di lapangan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi penerapan nilai ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kebijakan dan pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat dalam memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut agar pengelolaan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap menjaga identitas budaya dan nilai religius masyarakat.

Kata Kunci: Adat Basandi Syarak, pariwisata, nilai lokal, pengelolaan wisata, Bukittinggi.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Selain berfungsi sebagai sarana rekreasi dan hiburan, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Idealnya, pengembangan pariwisata di Indonesia harus mencerminkan identitas budaya bangsa, menjunjung tinggi nilai religius, serta tetap berpijak pada adat istiadat masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya masih banyak destinasi wisata yang lebih menitikberatkan aspek hiburan dan keuntungan ekonomi semata sehingga nilai budaya dan religius sering kali terabaikan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara konsep ideal pembangunan pariwisata dengan realitas yang terjadi di lapangan (Zhang, 2021).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal kuat dengan identitas budaya dan nilai keislamannya. Masyarakat Minangkabau memiliki falsafah hidup *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang bermakna bahwa adat bersendikan syariat Islam dan syariat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Falsafah tersebut telah menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau dalam berbagai aspek sosial, budaya, dan pemerintahan. Bahkan, ketentuan mengenai falsafah tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 5C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata besar adalah Kota Bukittinggi. Kota ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan yang memiliki kekayaan alam, sejarah, dan budaya yang kuat. Objek wisata seperti Jam Gadang, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, Panorama Lobang Jepang, serta Benteng Fort de Kock menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tingginya tingkat kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan daerah Kota Bukittinggi.

Dalam perspektif masyarakat Minangkabau, pengelolaan pariwisata seharusnya tidak terlepas dari penerapan nilai-nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Nilai tersebut menjadi pedoman moral dan etika sosial masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Menurut Mestika Zed (2020), ABS-SBK bukan hanya merupakan prinsip budaya, tetapi juga pedoman etika sosial yang harus diintegrasikan dalam seluruh praktik pembangunan daerah, termasuk sektor pariwisata.

Nilai-nilai luhur masyarakat Minangkabau sebagaimana tercantum dalam *Tambo: Tatanan Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau* mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti budi pekerti, perkawinan, penghormatan terhadap perempuan, penyesuaian adat dan agama, tanggung jawab sosial, serta rasa malu (*malu*) sebagai kontrol sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi identitas budaya yang

seharusnya tercermin dalam aktivitas pariwisata di Sumatera Barat, khususnya di Kota Bukittinggi.

Namun demikian, perkembangan sektor pariwisata modern turut menghadirkan tantangan terhadap keberlangsungan nilai budaya dan religius masyarakat. Komersialisasi pariwisata yang berlebihan menyebabkan nilai budaya dan kearifan lokal mulai terpinggirkan karena aktivitas wisata lebih menonjolkan keuntungan ekonomi dibandingkan pelestarian budaya dan moral masyarakat (Zhang, 2021). Fenomena ini terlihat dari meningkatnya aktivitas wisata yang kurang memperhatikan norma adat dan syariat Islam yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau.

Dalam konteks Kota Bukittinggi, penerapan nilai ABS-SBK dalam pengelolaan objek wisata dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku wisatawan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan masyarakat setempat, seperti cara berpakaian yang dianggap tidak mencerminkan nilai adat dan religius masyarakat Minangkabau. Selain itu, sebagian pengelola wisata dinilai masih lebih berorientasi pada aspek ekonomi dibandingkan penguatan nilai budaya dan syariat Islam dalam aktivitas pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan pedagang di kawasan Jam Gadang pada tanggal 28 Oktober 2025, diketahui bahwa masih banyak wisatawan dari luar daerah yang menggunakan pakaian terbuka di kawasan wisata. Namun, masyarakat sekitar cenderung enggan memberikan teguran karena merasa tidak memiliki kewenangan serta khawatir dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara wisatawan dan masyarakat lokal mengenai norma budaya yang berlaku.

Selain itu, sektor penginapan di Kota Bukittinggi juga menghadapi persoalan serupa. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat sekitar objek wisata, masih ditemukan penginapan yang belum menerapkan aturan secara ketat sesuai dengan nilai ABS-SBK, terutama terkait pengawasan terhadap pasangan yang menginap. Pengelola penginapan dinilai lebih mengutamakan aspek pelayanan dan keuntungan ekonomi dibandingkan penerapan norma adat dan agama.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal ABS-SBK dengan praktik pengelolaan pariwisata di lapangan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan dapat menyebabkan pergeseran nilai budaya dan menurunnya identitas religius masyarakat Minangkabau di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat penerapan nilai ABS-SBK melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari serta Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Minangkabau. Selain itu, Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 451/144/KESRA-2020 juga menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis nilai ABS-SBK.

Menurut Yunizar (2020), keberhasilan pelestarian nilai ABS-SBK sangat bergantung pada keterlibatan empat unsur utama masyarakat Minangkabau, yaitu *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, dan *bundo kanduang*. Oleh sebab itu,

pengelolaan pariwisata di Kota Bukittinggi seharusnya melibatkan seluruh unsur masyarakat agar pengembangan sektor wisata tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga mampu menjaga identitas budaya dan religius masyarakat setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pengelolaan Objek Wisata oleh Dinas Pariwisata di Kota Bukittinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih menekankan pada pemahaman makna, proses, dan konteks sosial daripada pengukuran dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berangkat dari proses berpikir induktif berdasarkan pengamatan terhadap fenomena sosial yang terjadi secara alamiah (Harahap, 2019).

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh dalam bentuk deskripsi kata-kata pada suatu konteks alamiah tertentu (Nasution, 2023). Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan secara mendalam bagaimana penerapan nilai-nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam pengelolaan objek wisata di Kota Bukittinggi. Pendekatan ini dianggap sesuai karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi hal yang penting, yaitu kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi nyata di lapangan (Adlini et al., 2022).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, yang dikenal memiliki identitas budaya Minangkabau yang kuat serta menjunjung tinggi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa objek wisata utama seperti Jam Gadang, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, Panorama Lobang Jepang, serta Benteng Fort de Kock. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2025. Penentuan waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Kota Bukittinggi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi dan wawancara mendalam di lapangan. Menurut Sugiyono, data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara terhadap informan yang memahami permasalahan penelitian (Fadillah, 2023). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pegawai Dinas Pariwisata, tokoh adat, masyarakat sekitar objek wisata, pedagang, serta ninik mamak yang memahami kondisi penerapan nilai adat dalam pengelolaan pariwisata. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui berbagai

sumber tidak langsung seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, arsip, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam dari para informan penelitian. Sugiyono dan Lestari menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang diteliti secara lebih detail dan terbuka (Sugiyono & Lestari, 2021). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan suasana yang santai namun tetap terarah agar informan dapat memberikan informasi secara jujur dan mendalam.

Selain itu, observasi juga dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi di lapangan. Adler dan Adler menjelaskan bahwa observasi merupakan salah satu metode penting dalam penelitian sosial karena memungkinkan peneliti melihat secara langsung fenomena yang terjadi (Hasanah, 2017). Melalui observasi ini, peneliti mengamati kondisi objek wisata, perilaku wisatawan, serta bagaimana nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* diterapkan dalam aktivitas pariwisata.

Teknik dokumentasi juga digunakan sebagai pelengkap data penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti foto, arsip, laporan, serta data resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan teknik yang dapat mendukung dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian (Nilamsari, 2014).

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Nasution, 2023). Informan yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, masyarakat yang berada di sekitar objek wisata, tokoh adat, pedagang di kawasan Jam Gadang, serta ninik mamak atau datuak yang memahami kondisi sosial budaya masyarakat Minangkabau.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif meliputi tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saleh, 2017). Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang dianggap relevan dengan penelitian sehingga lebih mudah dipahami. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan agar lebih mudah dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus sampai diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya (Rijali, 2019).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan untuk melihat kesesuaian informasi sehingga dapat meningkatkan kredibilitas data (Susanto et al., 2023). Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber yang sama untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh (Alfansyur & Mariyani, 2020). Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk menguji konsistensi informasi dari informan, karena kondisi dan situasi waktu dapat memengaruhi jawaban yang diberikan (Sugiyono, 2013 dalam Alfansyur & Mariyani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Nilai Adat Basandi Syarak Sarak Sarak Basandi kitabullah dalam Pengelolaan Objek wisata

Nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* merupakan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menegaskan bahwa adat harus berlandaskan syariat Islam, sedangkan syariat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Zed, 2020). Nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kota Bukittinggi.

Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi memiliki berbagai objek wisata yang setiap tahun ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata. Namun demikian, perkembangan sektor pariwisata juga menghadirkan tantangan dalam menjaga nilai budaya, norma sosial, dan identitas religius masyarakat setempat.

Dalam konteks tersebut, penerapan nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam pengelolaan objek wisata. Integrasi nilai ini diharapkan mampu memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga tetap menjaga karakter budaya dan religius masyarakat Minangkabau, sehingga Bukittinggi tetap dikenal sebagai destinasi wisata yang autentik, berbudaya, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Nilai Substantif

Nilai substantif dalam penerapan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSBK) dalam pengelolaan objek wisata di Kota Bukittinggi tercermin dari upaya menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga edukatif dan bermakna. Wisatawan tidak hanya menikmati daya tarik destinasi, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai nilai, norma, serta filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, wisata berbasis budaya memiliki nilai tambah karena mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan kultural dalam satu pengalaman wisata.

Penerapan nilai ini juga berkontribusi terhadap pembentukan citra destinasi yang berkarakter dan beridentitas kuat. Destinasi wisata yang konsisten menerapkan

nilai adat dan agama berpotensi membangun *branding* sebagai wisata berbasis budaya dan nilai (*value-based tourism*), yang sejalan dengan tren pariwisata global yang menekankan pengalaman autentik. Selain itu, nilai substantif juga memberikan dampak sosial berupa penguatan identitas budaya masyarakat serta pelestarian tradisi di tengah arus modernisasi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi di lapangan. Beberapa pengelola wisata belum sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan nilai ABSSBK dalam pelayanan wisata. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman sumber daya manusia serta belum adanya pelatihan khusus yang secara sistematis membahas penerapan nilai tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi masih bersifat teknis dan belum menyentuh aspek nilai secara menyeluruh.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengelola wisata Panorama Baru Kota Bukittinggi yang menyatakan bahwa sebagian petugas berasal dari luar daerah dan belum memahami konsep ABSSBK, serta tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait nilai tersebut. Akibatnya, pelayanan wisata hanya berfokus pada aspek operasional tanpa integrasi nilai budaya dan agama secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi yang memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan.

Selain itu, nilai substantif juga terlihat dari peran pariwisata sebagai media pelestarian budaya Minangkabau. Kegiatan wisata seperti pertunjukan seni tradisional dan interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal menjadi sarana transmisi nilai kepada generasi muda. Hal ini penting dalam menjaga keberlanjutan budaya di tengah modernisasi. Di sisi lain, kepuasan wisatawan juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang mencerminkan nilai lokal seperti keramahan, kesopanan, dan penghormatan terhadap tamu, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi destinasi wisata berbasis budaya.

Pemerintah daerah juga telah berupaya melestarikan budaya melalui penyelenggaraan berbagai event seni tradisional di kawasan Jam Gadang, seperti tari piring, randai, dan musik talempong. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya Minangkabau, tetapi juga memberikan pengalaman wisata yang autentik bagi pengunjung. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran kegiatan budaya serta minimnya regenerasi pelaku seni tradisional yang berpotensi menghambat keberlanjutan pelestarian budaya.

Dengan demikian, nilai substantif ABSSBK dalam pengelolaan wisata di Kota Bukittinggi telah diupayakan, namun implementasinya masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek sumber daya manusia, edukasi nilai, dan konsistensi integrasi budaya dalam pelayanan wisata.

Legitimasi dan Dukungan Publik

Legitimasi dan dukungan publik merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan berbasis nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSBK) dalam pengelolaan objek wisata. Legitimasi mencerminkan tingkat penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kebijakan

yang diterapkan, yang dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kebijakan dengan nilai budaya dan agama masyarakat Minangkabau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memberikan penerimaan yang baik terhadap penerapan nilai ABSSBK dalam pengelolaan wisata. Hal ini disebabkan karena nilai tersebut telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau, sehingga penerapannya dalam sektor pariwisata dianggap sesuai dengan norma yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya legitimasi sosial yang cukup kuat, yang menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan wisata berbasis nilai lokal.

Namun demikian, legitimasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian nilai, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ketidaktegasan dalam penerapan aturan serta kurangnya sosialisasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah dan pengelola wisata dalam menerapkan aturan secara konsisten serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap nilai adat tidak hanya dilakukan oleh wisatawan, tetapi juga oleh sebagian masyarakat lokal. Masih ditemui perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma adat, seperti penggunaan pakaian yang tidak sopan serta aktivitas yang bertentangan dengan nilai religius. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi ABSSBK tidak hanya berasal dari pengunjung luar, tetapi juga dari internal masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran kolektif dalam menjaga nilai budaya.

Dalam konteks ini, keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama menjadi sangat penting sebagai penguat kontrol sosial. Tokoh adat berperan sebagai penjaga nilai budaya, sedangkan tokoh agama memastikan kesesuaian aktivitas dengan ajaran Islam. Selain itu, dalam struktur sosial Minangkabau, datuak memiliki peran penting dalam memimpin kaum, menyelesaikan sengketa, serta membina generasi muda agar tetap berpegang pada nilai adat dan agama. Peran ini menunjukkan bahwa penguatan nilai ABSSBK tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berbasis struktur sosial adat yang hidup di masyarakat.

Hasil wawancara dengan datuak menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan adat masih berjalan di tingkat nagari, termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat yang telah disepakati secara musyawarah. Hal ini memperlihatkan bahwa secara sosial, nilai adat masih memiliki kekuatan, meskipun dalam konteks pariwisata modern masih perlu penguatan integrasi dengan kebijakan formal pemerintah.

Di sisi lain, dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan dan regulasi masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur perilaku wisatawan. Hingga saat ini, pengaturan lebih banyak berupa imbauan tanpa sanksi yang tegas, sehingga implementasi di lapangan lebih bergantung pada kesadaran individu serta pengawasan informal masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih operasional agar nilai ABSSBK dapat diterapkan secara lebih efektif dalam pengelolaan wisata.

Dukungan masyarakat sendiri juga dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata. Masyarakat yang merasakan dampak positif, seperti

peningkatan pendapatan dari aktivitas perdagangan di sekitar objek wisata, cenderung memiliki tingkat dukungan yang lebih tinggi terhadap pengembangan pariwisata. Namun demikian, agar dukungan tersebut tidak bersifat semata-mata ekonomi, diperlukan peningkatan partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi dan pemberdayaan.

Dengan demikian, legitimasi dan dukungan publik terhadap penerapan nilai ABSSBK dalam pengelolaan wisata di Kota Bukittinggi cukup kuat secara sosial, namun masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi, konsistensi implementasi, serta sinergi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat agar pelaksanaannya lebih optimal.

Kapasitas Operasional

Kapasitas operasional dalam pengelolaan wisata berbasis nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga mencakup kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, kapasitas operasional masih menunjukkan adanya kelemahan struktural, terutama pada aspek pengawasan, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga yang belum berjalan secara optimal dan terintegrasi.

Pengawasan terhadap pelanggaran norma adat dan agama di kawasan wisata masih tergolong lemah. Keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga masih terdapat celah terjadinya pelanggaran di lapangan. Pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat situasional dan terbatas pada titik serta waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum didukung oleh mekanisme yang jelas, baik dari segi pembagian tugas maupun koordinasi antar petugas, sehingga efektivitas pengendalian perilaku wisatawan masih rendah dan belum memberikan efek jera yang kuat.

Berdasarkan data lapangan, jumlah petugas pengelola objek wisata di Kota Bukittinggi berkisar antara 12 hingga 24 orang per objek wisata yang terdiri dari petugas loket, kebersihan, keamanan, pelayanan, dan koordinator lapangan. Jumlah ini menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia, terutama pada fungsi pengawasan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya penerapan nilai adat dan agama dalam pengelolaan wisata.

Selain keterbatasan jumlah, pemahaman sumber daya manusia terhadap nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah juga masih terbatas. Sebagian petugas hanya menjalankan tugas secara teknis tanpa mampu menginternalisasikan nilai budaya dan agama dalam pelayanan kepada wisatawan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa terdapat petugas yang berasal dari luar daerah dan belum memahami nilai adat tersebut secara mendalam, serta belum adanya pelatihan khusus yang berfokus pada internalisasi nilai tersebut. Akibatnya, fungsi edukatif dalam pengelolaan wisata belum berjalan secara optimal, padahal petugas seharusnya tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai representasi nilai budaya daerah.

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai program pelatihan, seperti pelatihan digital branding, pengelolaan kelembagaan wisata, sertifikasi pemandu wisata, serta pengelolaan homestay. Namun demikian, seluruh pelatihan tersebut masih lebih berfokus pada aspek teknis dan belum secara spesifik mengintegrasikan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai dasar pengelolaan wisata berbasis budaya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program pelatihan yang lebih komprehensif agar nilai-nilai adat dan agama dapat terinternalisasi dalam praktik pelayanan wisata.

Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti pemerintah daerah, lembaga adat, dan pengelola wisata juga belum berjalan secara optimal. Koordinasi yang ada masih bersifat insidental dan belum didukung oleh forum komunikasi yang rutin dan terstruktur. Masing-masing lembaga cenderung menjalankan perannya secara terpisah tanpa sinergi yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan dalam implementasi kebijakan. Lemahnya koordinasi ini juga berdampak pada lambatnya penanganan permasalahan di lapangan serta kurangnya keseragaman dalam penerapan nilai adat dan agama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi lebih sering dilakukan antar sesama pengelola, sementara keterlibatan pemerintah dan tokoh adat masih terbatas pada kegiatan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi melalui pembentukan forum komunikasi yang berkelanjutan, peningkatan intensitas pertemuan, serta kejelasan pembagian peran antar lembaga agar pengelolaan wisata berbasis nilai adat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Faktor yang menghambat penerapan Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah pengelolaan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, terdapat empat faktor utama yang menghambat penerapan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam pengelolaan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi.

Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah petugas di lapangan masih belum sebanding dengan jumlah wisatawan, terutama pada saat kunjungan tinggi seperti hari libur, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pengawasan. Selain itu, masih terdapat petugas yang belum memahami secara mendalam nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, khususnya mereka yang berasal dari luar daerah atau belum mendapatkan pelatihan khusus. Kondisi ini menyebabkan penerapan nilai adat dan agama belum berjalan secara konsisten, karena sebagian petugas hanya berfokus pada tugas teknis tanpa menginternalisasi nilai budaya lokal dalam pelayanan wisata.

Faktor kedua adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam sektor pariwisata. Meskipun nilai tersebut telah menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau, hingga saat ini belum tersedia aturan teknis yang secara rinci dan operasional

mengatur implementasinya di objek wisata. Hal ini menyebabkan pengelola tidak memiliki pedoman yang jelas dan seragam, sehingga penerapan nilai cenderung berbeda di setiap lokasi wisata. Ketiadaan regulasi ini juga berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan aturan karena tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Faktor ketiga adalah kepedulian masyarakat yang belum menyeluruh. Sebagian masyarakat memang mendukung penerapan nilai adat dalam pariwisata, namun sebagian lainnya masih bersikap pasif terhadap pelanggaran norma di kawasan wisata. Hal ini terlihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta kecenderungan untuk tidak menegur wisatawan yang melanggar aturan karena merasa bukan tanggung jawab langsung atau takut terjadi kesalahpahaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial masyarakat belum berjalan optimal sehingga diperlukan peningkatan kesadaran melalui sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor keempat adalah keterbatasan koordinasi antar lembaga, yaitu antara pemerintah daerah, lembaga adat (LKAAM dan KAN), serta pengelola wisata. Koordinasi yang dilakukan masih bersifat tidak rutin dan lebih sering terjadi secara insidental, sehingga belum menciptakan sinergi yang kuat dalam pengelolaan wisata berbasis nilai adat dan agama. Kurangnya komunikasi yang terstruktur menyebabkan perbedaan pemahaman dalam implementasi kebijakan serta lambatnya penanganan masalah di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi melalui forum komunikasi yang rutin dan pembagian peran yang lebih jelas agar pengelolaan wisata dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam pengelolaan objek wisata di Kota Bukittinggi belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat dilihat melalui pendekatan *public value* yang mencakup aspek nilai substantif, legitimasi dan dukungan publik, serta kapasitas operasional. Dari aspek nilai substantif, pengelolaan objek wisata belum sepenuhnya mampu mengarahkan perilaku wisatawan secara konsisten sesuai dengan nilai adat dan agama, sehingga integrasi nilai tersebut masih bersifat parsial dalam praktik di lapangan. Dari aspek legitimasi dan dukungan publik, meskipun masyarakat pada dasarnya telah memahami dan menerima nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, partisipasi aktif dalam penerapannya di kawasan wisata masih rendah, di mana masyarakat cenderung bersikap pasif dan menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah atau petugas. Sementara itu, dari aspek kapasitas operasional, peran Dinas Pariwisata sebagai *leading sector* belum berjalan secara maksimal, terutama dalam hal sosialisasi, edukasi, serta pengawasan terhadap implementasi nilai-nilai tersebut di objek wisata.

Adapun faktor-faktor yang menghambat belum optimalnya penerapan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam pengelolaan objek wisata di Kota Bukittinggi meliputi keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penerapan

nilai tersebut dalam sektor pariwisata, kepedulian masyarakat yang belum menyeluruh, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga yang melibatkan pemerintah daerah, LKAAM, KAN, dan pengelola wisata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam pengelolaan objek wisata di Kota Bukittinggi masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara nyata dalam praktik pengelolaan pariwisata.

REFERENSI

- Aditiawarman. (2003). Laporan Kemajuan Penelitian Tahap III: Aktualisasi ABS-SBK di Sumatera Barat. IAIN Imam Bonjol.
- Amin, I. (2022). Implementasi hukum Islam dalam falsafah ABS-SBK. *Ijtihad*, 38(1), 15–26.
- Anas, A. (2010). Konsep mahar dalam “Counter Legal Draft” Kompilasi Hukum Islam. UIN Syarif Hidayatullah.
- Ardika, I W. (2021). *Pariwisata Berbasis Budaya*. Udayana University Press.
- Azhari. (2020). Penguatan nilai kearifan lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
- Dalil, F., & Rahardjo, T. (2019). Peran sesepuh adat. *Interaksi Online*, 7(3).
- Datoek Toeh, H. (1989). *Tambo Alam Minangkabau*.
- Elimartati. (2017). Nilai-nilai ABS-SBK dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1).
- Fadli, M. (2015). Krisis nilai ABS-SBK. *Jurnal Sosial dan Budaya Minangkabau*, 3(1), 45–57.
- Fitriani, A. (2019). Peran nilai adat dan agama dalam pelestarian objek wisata budaya di Tanah Datar. Universitas Andalas.
- Hayati, N., & Rini, D. (2019). Peran lembaga adat. *Jurnal Kajian Adat dan Budaya Islam*, 7(2), 89–101.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- LKAAM Sumatera Barat. (2020). *Pedoman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.
- Maulana, H. (2022). Pariwisata syariah di Padang. *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 5(1), 45–55.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Naim, M. (2007). *Merantau: Pola migrasi suku Minangkabau*. Gadjah Mada University Press.
- Nasroen. (1957). *Dasar falsafah adat Minangkabau*. Balai Pustaka.
- Navis, A. A. (1984). *Alam terkembang jadi guru*. Grafiti Press.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai ABS-SBK.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Rahayu, S. (2020). Pariwisata halal di Lombok. *Jurnal Pariwisata Islam*, 3(2), 87–96.
- Rusdi, M. (2017). *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. LKAAM Sumatera Barat.
- Saputra, H., & Rahma, N. (2023). Strategi pengelolaan wisata. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 75–90.

- Sofyan, A. (2004). Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Yayasan Sako Batuah.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yunizar. (2020). Revitalisasi nilai ABS-SBK. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 5(1), 34-46.